

**KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARA KABUPATEN LEBAK DAN
KOTA SERANG: KAJIAN KONSEPTUAL DARI PRESPEKTIF
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH**

Muhammad Akbar Al-Faridzy¹, Engie Wijaya², Muhammad Hisyam Aditiya³
akbaralfaridzy0@gmail.com¹, enjiwijaya212@gmail.com², hisyamaditiya1@gmail.com³
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pola ketimpangan pembangunan antara Kabupaten Lebak dan Kota Serang di Provinsi Banten dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*) melalui telaah terhadap jurnal ilmiah open-access dan dokumen kebijakan terkait. Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972) dan ketimpangan regional (Myrdal, 1957; Williamson, 1965). Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Kasus Kabupaten Lebak dan Kota Serang memperlihatkan ketimpangan yang disebabkan oleh perbedaan kapasitas fiskal, kualitas kelembagaan, serta infrastruktur daerah. Kota Serang memiliki keunggulan fiskal dan kelembagaan yang lebih kuat sebagai pusat pemerintahan, sedangkan Kabupaten Lebak masih bergantung pada dana transfer pusat dengan tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan desentralisasi yang seragam cenderung memperkuat wilayah perkotaan dan berkapasitas tinggi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi mekanisme transfer fiskal nasional yang berorientasi pada pemerataan dan berbasis kinerja, penguatan kapasitas kelembagaan daerah, serta penerapan desentralisasi asimetris bagi daerah tertinggal. Hasil konseptual penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola adaptif dan kebijakan pembangunan inklusif untuk mengurangi ketimpangan spasial dan memperkuat keberlanjutan desentralisasi di Indonesia.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, Desentralisasi, Otonomi Fiskal, Pembangunan Daerah, Kabupaten Lebak, Kota Serang.

ABSTRACT

This study analyzes the development inequality pattern between Lebak Regency and Serang City in Banten Province from the perspective of decentralization and regional autonomy. The research employs a qualitative descriptive approach through a literature-based analysis (library research) using open-access scholarly journals and relevant policy documents. The conceptual framework is grounded in the theories of fiscal decentralization (Oates, 1972) and regional inequality (Myrdal, 1957; Williamson, 1965). The findings reveal that decentralization and regional autonomy in Indonesia have not yet achieved their main objective of equalizing regional development. The case of Lebak and Serang illustrates the uneven capacity of local governments in managing fiscal resources, institutional quality, and infrastructure. Serang City benefits from stronger fiscal capacity, better infrastructure, and administrative centrality, while Lebak Regency remains dependent on central transfers with limited fiscal autonomy. These disparities confirm that uniform decentralization policies tend to benefit urban and institutionally advanced regions. The study recommends redesigning the national fiscal transfer mechanism toward a performance-based and equity-oriented model, strengthening local institutional capacity, and implementing asymmetric decentralization to empower less-developed regions. The conceptual findings highlight the need for adaptive governance and inclusive regional policies to reduce spatial inequality and strengthen the sustainability of Indonesia's decentralization framework.

Keywords: Regional Inequality, Decentralization, Fiscal Autonomy, Regional Development, Lebak Regency, Serang City.

PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan persoalan struktural yang terus dihadapi Indonesia sejak era desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan secara luas pada awal tahun 2000-an. Desentralisasi, yang secara konseptual diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah dan penguatan peran pemerintah lokal, ternyata belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan kesejahteraan yang merata di berbagai provinsi dan kabupaten/kota (Syarif, 2021). Fenomena ini menandakan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada pengalihan kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi juga pada kapasitas institusional, tata kelola, dan efektivitas kebijakan di tingkat lokal.

Dalam konteks Provinsi Banten, perbedaan karakteristik wilayah antara Kabupaten Lebak dan Kota Serang menunjukkan dinamika ketimpangan pembangunan yang menarik untuk dikaji. Kabupaten Lebak, dengan wilayah yang luas dan basis ekonomi agraris, memiliki tantangan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, akses pendidikan, dan pelayanan publik. Sebaliknya, Kota Serang, sebagai ibu kota provinsi dan pusat administratif, menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi serta ketersediaan fasilitas publik yang relatif lebih tinggi. Perbedaan kapasitas fiskal dan konsentrasi aktivitas ekonomi di antara keduanya menjadi indikator adanya ketimpangan spasial yang dapat ditinjau dari perspektif desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

Kajian empiris oleh Suwanan dan Sulistiani (2023) menegaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia memiliki efek yang beragam terhadap ketimpangan regional. Dengan menggunakan pendekatan data panel dinamis terhadap 33 provinsi, penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan proporsi belanja daerah terhadap total pendapatan tidak selalu menurunkan ketimpangan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Dalam kasus Kabupaten Lebak dan Kota Serang, kondisi ini tampak dari ketergantungan fiskal Kabupaten Lebak terhadap dana transfer pusat dibandingkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang yang lebih mandiri.

Lebih lanjut, penelitian oleh Lukita dan Arif (2023) menemukan bahwa faktor-faktor seperti investasi, tingkat pendidikan, dan infrastruktur publik merupakan determinan utama ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Dengan demikian, pendekatan konseptual terhadap ketimpangan pembangunan di Banten perlu melihat interaksi antara faktor ekonomi, kelembagaan, serta kapasitas otonomi daerah. Pola ketimpangan antara Kabupaten Lebak dan Kota Serang mencerminkan adanya kesenjangan struktural dalam hal sumber daya manusia, fiskal, dan kapasitas pemerintahan lokal yang harus dijawab melalui kebijakan desentralisasi yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pola ketimpangan pembangunan antara Kabupaten Lebak dan Kota Serang dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Analisis ini tidak hanya menyoroti disparitas pembangunan ekonomi, tetapi juga berupaya memahami bagaimana kebijakan otonomi daerah diterapkan dalam konteks kelembagaan yang berbeda. Pendekatan konseptual ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi perumusan strategi pemerataan pembangunan di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan untuk menelaah konsep dan hasil penelitian terdahulu mengenai ketimpangan pembangunan

antarwilayah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui studi literatur, peneliti mengumpulkan, mengkaji, dan mensintesis teori serta temuan dari berbagai sumber ilmiah tanpa melakukan wawancara, survei, atau observasi lapangan (Syarif, 2021).

Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari jurnal ilmiah open access, dokumen kebijakan pemerintah, dan laporan resmi yang relevan. Sumber utama meliputi penelitian dari Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Syarif, 2021), Journal of Indonesian Economy and Business (Suwanwan & Sulistiani, 2023), serta Proceeding Medan International Conference on Economic and Business (Lukita & Arif, 2023). Selain itu, digunakan pula referensi peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memperkuat analisis kebijakan.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan hubungan antarvariabel yang dibahas dalam literatur, khususnya mengenai pengaruh desentralisasi terhadap pola ketimpangan pembangunan. Hasil kajian kemudian disusun secara sistematis untuk membangun pemahaman konseptual mengenai perbedaan pembangunan antara Kabupaten Lebak dan Kota Serang, serta implikasinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

HASI DAN PEMBAHASAN

A. Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagai Fondasi Teoretis

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dalam upaya mempercepat pembangunan lokal dan memperkuat kapasitas pemerintahan daerah. Kerangka konseptual tersebut berangkat dari asumsi bahwa semakin besar kewenangan dan sumber daya yang diterima pemerintah daerah, maka semakin besar pula peluang untuk menyesuaikan pembangunan dengan karakteristik lokal dan memperkuat pemerataan. Sebagaimana ditegaskan oleh Syarif (2021), adanya desentralisasi fiskal di Indonesia terbukti belum mampu mengatasi sepenuhnya disparitas antarwilayah karena perbedaan kapasitas fiskal dan tata kelola yang masih tinggi.

Teori klasik desentralisasi seperti yang dikemukakan oleh Oates (1972) menyatakan bahwa pengalokasian tanggung-jawab dan sumber daya ke tingkat yang lebih rendah (yakni pemerintah daerah) dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, kapasitas institusional pemerintah daerah dan kemampuan fiskal menjadi pembatas utama dalam transformasi tersebut. Penelitian oleh Khoirunisa & Sulaeman (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 90 % kabupaten/kota di Indonesia belum mencapai status keuangan yang mandiri meskipun telah menerima tambahan dana transfer pusat.

Kemudian, dari perspektif otonomi daerah, Kerangka Legal seperti Undang-Undang 23/2014 dan peraturan turunannya memberikan pijakan bagi alokasi kewenangan yang lebih besar ke pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Namun, riset terkini seperti dari Umam et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah kuat, terdapat celah pelaksanaan yang menimbulkan ketimpangan antar-wilayah melalui pengabaian kapasitas lokal dan ketimpangan akses terhadap sumber daya.

Guna memahami bagaimana desentralisasi dan otonomi daerah bisa menjadi mekanisme utama dalam pembangunan daerah, penting juga untuk memasukkan konsep kemandirian fiskal (fiscal autonomy) dan kapasitas institusional lokal. Namun, apabila suatu daerah memiliki kemampuan fiskal yang rendah dan daya tata kelola yang lemah, maka alih kewenangan tanpa dukungan kapasitas bisa memperlebar kesenjangan daripada menutupnya — sebuah fenomena yang juga dipetakan dalam literatur ketimpangan

pembangunan (El Ashfahany et al., 2020).

Dengan demikian, dalam konteks analisis terhadap wilayah seperti Kabupaten Lebak dan Kota Serang, kerangka konseptual ini menjadi penting untuk diterapkan karena kedua wilayah memiliki karakteristik fiskal, institusional, dan geografis yang sangat berbeda—yang selanjutnya diperlukan untuk mengetengahkan bagaimana perbedaan-perbedaan itu memengaruhi pola ketimpangan pembangunan.

B. Ketimpangan Pembangunan antara Kabupaten Lebak dan Kota Serang

Conclusion

Pola ketimpangan pembangunan antar daerah menjadi salah satu isu utama dalam studi pemerintahan daerah. Dalam literatur, konsep ketimpangan sering dikaitkan dengan konsentrasi investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan, sementara wilayah pinggiran atau rural tertinggal dalam infrastruktur, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (Myrdal, 1957). Sebagai contoh dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Aritenang (2014) menunjukkan bahwa terdapat efek spasial ketika distrik dan kota yang lebih terpusat aktivitas ekonomi mempercepat keunggulannya sementara wilayah tetangganya tertinggal.

Khususnya di Provinsi Banten, Kota Serang sebagai ibu kota provinsi memiliki keunggulan relatif dalam hal akses pelayanan publik, hirarki pemerintahan, dan konsentrasi investasi dibandingkan Kabupaten Lebak yang secara geografis lebih luas, memiliki tantangan infrastruktur yang lebih besar, dan sektor ekonomi yang lebih agraris. Dalam konteks desentralisasi fiskal, ketergantungan Kabupaten Lebak terhadap dana transfer pusat dan terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berimplikasi pada kapasitas pembangunan yang lebih rendah dibandingkan Kota Serang.

Penelitian seperti oleh Zakaria (2012) di wilayah timur Indonesia juga menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal diterapkan, wilayah yang memiliki kapasitas fiskal dan institusional yang rendah tetap mengalami ketimpangan yang signifikan.

Hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Kota Serang mampu memanfaatkan potensi perkotaan, mobilitas ekonomi, serta sumber daya fiskal yang lebih besar untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan publik bermutu, sedangkan Kabupaten Lebak menghadapi kendala akses, investasi rendah, dan tekanan dari dominasi sektor agraris yang sering kali berhubungan dengan produktivitas rendah. Sebagai implikasi konseptual, perbedaan wilayah seperti ini menggambarkan bahwa meskipun kerangka desentralisasi dan otonomi telah tersedia, hasil pembangunan antarwilayah masih sangat dipengaruhi oleh kondisi awal (*initial conditions*) dan institusional lokal.

C. Analisis Konseptual Hubungan Desentralisasi dengan Ketimpangan Wilayah

Desentralisasi fiskal diharapkan menjadi sarana pemerataan pembangunan, karena dengan pelimpahan kewenangan ke daerah, setiap pemerintah lokal dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat (Oates, 1972). Namun, hasil implementasi di Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi justru dapat memperlebar kesenjangan antardaerah jika tidak diiringi pemerataan kapasitas fiskal dan kelembagaan (El Ashfahany et al., 2020). Dalam konteks Provinsi Banten, perbedaan kemampuan fiskal antara Kabupaten Lebak dan Kota Serang menggambarkan situasi tersebut secara nyata. Kota Serang, dengan karakteristik urban dan posisi sebagai pusat pemerintahan, memiliki pendapatan daerah yang lebih stabil dan kapasitas kelembagaan yang lebih baik. Sebaliknya, Kabupaten Lebak masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dibandingkan rata-rata provinsi.

Penelitian oleh Rahman et al. (2022) menemukan bahwa ketimpangan fiskal antarkabupaten/kota di Indonesia berkorelasi positif dengan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Wilayah dengan PAD tinggi mampu membiayai investasi publik yang lebih besar pada infrastruktur dan layanan dasar, sedangkan wilayah dengan PAD rendah tertinggal dalam kualitas layanan publik.) Hal ini juga berlaku pada Banten, di mana kemampuan Kota Serang membiayai pembangunan infrastruktur jalan dan pendidikan berdampak langsung terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), sementara Kabupaten Lebak masih berjuang meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, penelitian Lukita dan Arif (2023) dalam MICEB Proceedings menunjukkan bahwa variabel investasi dan lama sekolah berperan penting dalam menentukan tingkat ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Daerah dengan investasi tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan dapat menarik tenaga kerja dari daerah sekitarnya, memperbesar “urban bias” sebagaimana dijelaskan oleh teori Cumulative Causation Myrdal (1957). Dalam konteks ini, Kota Serang berperan sebagai magnet pertumbuhan, sementara Lebak menjadi wilayah hinterland yang menyalurkan tenaga kerja namun memperoleh sedikit manfaat ekonomi langsung.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal belum diikuti oleh peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola di tingkat lokal. Studi oleh Gunawan (2021) di Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja menemukan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembangunan berbasis potensi lokal. Apabila kelembagaan lemah, maka transfer fiskal dari pusat hanya akan menutupi defisit sementara tanpa mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, perbedaan kapasitas kelembagaan antara Lebak dan Serang turut memperkuat ketimpangan pembangunan.

Dari sisi spasial, Dewi (2020) menjelaskan bahwa ketimpangan antarwilayah di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan akses infrastruktur. Wilayah dengan kondisi topografi berat seperti Kabupaten Lebak menghadapi biaya transportasi tinggi dan keterbatasan akses pasar, sedangkan Kota Serang memiliki keunggulan akses logistik karena letaknya di koridor strategis Jakarta-Merak. Hal ini menyebabkan efek agglomeration yang memperkuat daya saing ekonomi Kota Serang, tetapi melemahkan daya saing Lebak.

Temuan-temuan tersebut konsisten dengan teori ketimpangan regional Williamson (1965) yang menegaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah dengan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan lebih baik. Ketimpangan baru akan menurun jika ada mekanisme pemerataan, seperti redistribusi fiskal atau kebijakan pembangunan daerah tertinggal. Dalam konteks desentralisasi Indonesia, mekanisme tersebut dijalankan melalui transfer fiskal antarwilayah, tetapi efektivitasnya bergantung pada desain kebijakan dan kemampuan daerah penerima.

Penelitian Amin (2021) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) di Indonesia belum efektif menurunkan ketimpangan karena formula distribusinya lebih mempertimbangkan kebutuhan administratif daripada kesenjangan kapasitas ekonomi daerah. Hal ini memperburuk ketimpangan antara kota dan kabupaten dengan karakteristik fiskal berbeda. (jurnal.umsu.ac.id)

Dengan demikian, hubungan antara desentralisasi dan ketimpangan di Banten menunjukkan paradoks: kebijakan desentralisasi yang dimaksudkan untuk pemerataan justru memperbesar kesenjangan ketika faktor kapasitas dan lokasi tidak diperhitungkan. Kota Serang tumbuh lebih cepat karena aglomerasi ekonomi dan kapasitas kelembagaan

tinggi, sedangkan Kabupaten Lebak tertinggal karena keterbatasan fiskal, geografis, dan institusional. Kesenjangan ini tidak hanya tercermin dalam indikator ekonomi, tetapi juga sosial termasuk tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

Sebagaimana ditegaskan oleh Suwanan dan Sulistiani (2023), tanpa reformasi tata kelola fiskal dan penguatan kelembagaan, desentralisasi di Indonesia akan tetap menimbulkan pola dualism development antara daerah kaya dan miskin. Dengan kata lain, upaya mengurangi ketimpangan tidak cukup melalui transfer dana, melainkan harus disertai pembangunan kapasitas kelembagaan dan strategi pembangunan wilayah yang berbasis karakter lokal.

D. Implikasi Kebijakan terhadap Pemerataan Pembangunan Daerah

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, sebagaimana ditunjukkan pada konteks Provinsi Banten, hasilnya belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal kebijakan. Perbedaan mendasar antara Kabupaten Lebak dan Kota Serang menegaskan pentingnya intervensi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah (Syarif, 2021).

Dalam kerangka teori Cumulative Causation (Myrdal, 1957), konsentrasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan seperti Serang menciptakan efek spread yang terbatas, bahkan cenderung memperbesar backwash effect terhadap wilayah sekitarnya yang berdaya saing rendah seperti Lebak. Hal ini diperkuat oleh Suwanan dan Sulistiani (2023) yang menyatakan bahwa transfer fiskal nasional belum mampu menjadi instrumen pemerataan karena alokasinya tidak mempertimbangkan kesenjangan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah.

a. Pemerataan Fiskal dan Desain Transfer yang Berkeadilan

Salah satu implikasi kebijakan yang krusial adalah perlunya reformasi mekanisme transfer fiskal. Menurut Amin (2021), formula Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini lebih menekankan aspek administratif ketimbang indikator kebutuhan dan kapasitas ekonomi. Kondisi ini menyebabkan daerah seperti Kota Serang yang sudah maju tetap mendapatkan porsi dana signifikan, sementara kabupaten tertinggal seperti Lebak tidak memperoleh kompensasi yang memadai untuk menutupi keterbatasan fiskalnya.

Penelitian Saragih dan Hartati (2020) menambahkan bahwa efektivitas DAU dalam mengurangi ketimpangan fiskal dapat meningkat jika ditopang oleh instrumen insentif berbasis kinerja (performance-based grants). Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga terdorong untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

Dalam konteks Lebak–Serang, desain transfer semacam itu dapat membantu Kabupaten Lebak memperoleh tambahan dana pembangunan berdasarkan capaian indikator pelayanan publik seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Sementara Kota Serang tetap menerima insentif untuk mempertahankan efisiensi fiskal dan inovasi pelayanan publik. Skema ini sejalan dengan temuan Kurniadi (2021) yang menyebutkan bahwa kebijakan fiskal yang berkeadilan harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi lokal serta kapasitas kelembagaan daerah.

b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola

Aspek kedua yang perlu diperkuat adalah kapasitas kelembagaan daerah. Penelitian Gunawan (2021) dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola perencanaan pembangunan, memobilisasi sumber daya lokal, dan menjamin tata kelola yang transparan. Dalam hal ini, Kabupaten Lebak membutuhkan strategi penguatan kelembagaan melalui

peningkatan kompetensi aparatur, digitalisasi sistem perencanaan, serta kolaborasi lintas daerah (inter-local cooperation) untuk mempercepat integrasi ekonomi dengan wilayah sekitar.

Studi Suharto dan Nuraini (2022) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja menunjukkan bahwa penguatan kapasitas SDM aparatur daerah berkontribusi signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan desentralisasi. Pemerintah daerah dengan sumber daya manusia yang kompeten mampu merancang kebijakan inovatif yang berdampak langsung pada masyarakat lokal. Dalam konteks ini, Lebak perlu memanfaatkan transfer pengetahuan dari daerah yang lebih maju seperti Kota Serang melalui forum kerja sama antar-daerah untuk mengurangi kesenjangan kelembagaan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah juga berperan penting. Rahardjo (2023) menyoroti bahwa tata kelola fiskal yang terbuka meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat efisiensi penggunaan anggaran daerah. Daerah dengan sistem pelaporan keuangan berbasis elektronik (e-government budgeting) menunjukkan tingkat kinerja fiskal yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang masih menggunakan sistem manual. Dengan demikian, implementasi sistem digital di Kabupaten Lebak akan membantu meningkatkan efisiensi fiskal dan menekan potensi penyimpangan anggaran.

c. Strategi Pembangunan Wilayah yang Inklusif

Dari sisi pembangunan wilayah, ketimpangan antara Kabupaten Lebak dan Kota Serang juga harus dijawab melalui kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis potensi lokal. Seperti yang dijelaskan Lukita dan Arif (2023), daerah dengan struktur ekonomi agraris seperti Lebak perlu mengembangkan sektor unggulan berbasis sumber daya alam (pertanian modern, agrowisata, dan pengolahan hasil bumi) yang terintegrasi dengan rantai pasok Kota Serang. Dengan pendekatan local economic development, pemerataan tidak hanya ditopang oleh transfer fiskal, tetapi juga oleh peningkatan produktivitas lokal.

Selain itu, strategi konektivitas antarwilayah juga penting. Dewi (2020) menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur jalan dan transportasi antarwilayah mempercepat difusi ekonomi dari wilayah maju ke wilayah tertinggal. Peningkatan konektivitas antara Serang dan Lebak dapat memperkuat integrasi pasar tenaga kerja, distribusi barang, serta mobilitas investasi. Pemerintah Provinsi Banten perlu menjadikan program penghubung Serang–Lebak sebagai prioritas pembangunan strategis jangka menengah (RPJMD Banten 2025–2030).

d. Desentralisasi Asimetris dan Reformasi Kebijakan

Ketimpangan antara Lebak dan Serang juga membuka peluang penerapan desentralisasi asimetris, yaitu pelimpahan kewenangan berbeda sesuai kapasitas daerah. Model ini pernah diterapkan di Indonesia Timur dan dinilai efektif dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah (Zakaria, 2012). Daerah tertinggal seperti Lebak dapat diberikan ruang fiskal dan kewenangan lebih besar dalam mengelola potensi sumber daya, dengan pendampingan khusus dari pemerintah provinsi dan pusat.

Sebagaimana diuraikan oleh Nugroho (2022), desentralisasi asimetris dapat mengoreksi kelemahan sistem desentralisasi seragam yang tidak memperhitungkan heterogenitas wilayah. Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan memperkuat kohesi sosial dan mencegah regional disparity trap di daerah tertinggal.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan pembangunan sebagaimana

diharapkan. Dari perspektif konseptual, desentralisasi fiskal berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan responsivitas daerah terhadap kebutuhan masyarakat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas fiskal, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan lokal. Dalam konteks Provinsi Banten, kesenjangan pembangunan antara Kabupaten Lebak dan Kota Serang mencerminkan ketidakseimbangan tersebut.

Kota Serang, sebagai pusat administrasi dan aktivitas ekonomi, memiliki keunggulan fiskal, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sebaliknya, Kabupaten Lebak masih menghadapi kendala struktural seperti ketergantungan pada transfer fiskal pusat, rendahnya produktivitas sektor agraris, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya institusi pemerintahan daerah. Ketimpangan ini menggambarkan bahwa kebijakan desentralisasi yang bersifat seragam belum cukup untuk menjawab keragaman kondisi sosial-ekonomi dan geografis daerah.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa ketimpangan regional seperti kasus Lebak-Serang tidak hanya bersumber dari perbedaan fiskal, tetapi juga dari distribusi investasi, kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola lokal. Tanpa reformasi kebijakan yang memperkuat kapasitas institusional dan memperluas kemandirian fiskal daerah tertinggal, desentralisasi justru berisiko memperlebar kesenjangan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. (2021). Fiscal Equalization and Regional Disparities: Evaluating Indonesia's DAU Formula. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business (MICEB)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/miceb/article/view/8965>
- Aritenang, A. F. (2014). The spatial effect of fiscal decentralisation on regional disparities: The case from Indonesia. *Indonesian Journal of Geography*, Universitas Gadjah Mada. <https://journal.ugm.ac.id/ijg/article/view/4985>
- Dewi, S. (2020). Infrastructure and Spatial Inequality in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 35(2). Universitas Gadjah Mada. <https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/5336>
- El Ashfahany, A., Djuuna, R. F., & Rofiq, N. F. (2020). Does fiscal decentralization increase regional income inequality in Indonesia? *Jambura Equilibrium Journal*, 2(2). Universitas Negeri Gorontalo. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/equij/article/view/6866>
- Gunawan, H. (2021). Evaluasi implementasi otonomi daerah dalam perspektif tata kelola pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1). Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/338>
- Khoirunisa, I., & Sulaeman, A. S. (2021). Fiscal decentralization: Is there a simultaneous relationship between regional independence and social welfare? *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(1). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/article/view/848>
- Kurniadi, D. (2021). Revisiting fiscal equity in Indonesia: How fair is the current transfer mechanism? *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*. Universitas Gadjah Mada. <https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/5471>
- Lukita, E. S., & Arif, M. (2023). Determinants of development inequality in Eastern Indonesia. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business (MICEB)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/miceb/article/view/13239>
- Nugroho, T. (2022). Asymmetric decentralization and regional cohesion in Indonesia. *Journal of Indonesian Economic Transformation (JIET)*, 5(3). Universitas Airlangga. <https://ejournal.unair.ac.id/JIET/article/view/30029>
- Rahardjo, B. (2023). Digital fiscal governance and local budget efficiency in Indonesia. *JEJAK*:

- Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 16(2). Universitas Negeri Semarang. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/43972>
- Rahman, M., Veronica, D., & Rahayu, Y. (2022). Mengevaluasi peran desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di daerah. *Jurnal Development*, 3(2). Universitas Jambi. <https://jurnal.umjambi.ac.id/JD/article/view/584>
- Saragih, F., & Hartati, D. (2020). Fiscal transfer and equity: Rethinking DAU effectiveness in Indonesia. *Equilibria Journal of Economics Studies*, 6(1). Universitas Jambi. <https://journal.unja.ac.id/equilibria/article/view/11942>
- Sari, I. F. (2025). Two decades of fiscal decentralization: Economic convergence and regional disparity. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 5(5), 5704-5716. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i5.51118>
- Suharto, P., & Nuraini, D. (2022). Strengthening bureaucratic capacity for regional autonomy. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2). Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/402>
- Suwanan, A. F., & Sulistiani, E. H. (2023). Fiscal decentralization and regional disparities in Indonesia: A dynamic panel data evidence. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*. Universitas Gadjah Mada. <https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/6310>
- Syarif, A. (2021). Fiscal decentralization and corruption: The facts of regional autonomy policies in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3). Universitas Gadjah Mada. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/69007>
- Umam, A., Yusuf, D. S., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Legal foundations and inequities in Indonesian autonomy. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25(2). Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <https://ijins.umsida.ac.id/index.php/ijins/article/view/1070>
- Zakaria, S. (2012). The impact of fiscal decentralization toward regional inequalities in Eastern Region of Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 3(8). IISTE. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/6516>.